

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) (RUU) secara resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Sidang Paripurna DPR, menandai awal tahun 2022. Sebenarnya, pengalihan Ibu Kota Negara bukanlah hal baru di Indonesia. Perdebatan ini dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ketika ia berusaha merelokasi ibu kota ke Palangkaraya karena posisinya yang lebih menguntungkan. Jokowi menghidupkan kembali percakapan ini dan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam sidang tahunan DPR/MPR tahun 2019. (Redaksi, 2022).

Bahkan dalam *scope* global, beberapa negara telah berhasil memindahkan ibu kota negaranya dan bisa menjadi *lesson learned* untuk Indonesia. Di Benua Amerika Selatan, Brazil menjadi contoh familiar dalam pemindahan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960 (Aziz, 2019). Alasan pemindahan ibu kota ini adalah faktor keamanan dimana Rio de Janeiro yang berada di pinggir pantai. Selain itu, kepadatan penduduk dan pemerataan pembangunan juga menjadi alasan pemindahan ibu kota di Brazil. Lebih dekat di Benua Asia, Kazakhstan di tahun 1997 memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana/Nur Sultan karena alasan rawan gempa di Almaty. Lebih dekat lagi di Asia Tenggara, Myanmar menjadi negara tetangga yang juga memindahkan ibu kotanya

dari Yangon ke Naypyidaw di tahun 2005 dengan alasan lokasi yang lebih strategis dan aman dari invasi musuh (Aziz, 2019).

Proses pemindahan ibu kota dari beberapa negara ini dilatarbelakangi dengan alasan-alasan yang berbeda. Pada umumnya ada negara yang ingin mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota. Namun, ada juga yang memilih untuk memindahkan ibu kota negara dengan alasan khusus seperti rawan bencana atau lokasi yang kurang strategis untuk menjalankan pemerintahan.

Perihal perpindahan ibu kota, hal ini tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Lokasi di mana ibu kota negara akan direlokasi harus disiapkan untuk menjalankan semua sektor. Sebelum pindah, bangunan dan prasarana, penyiapan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan sistem pendukung lainnya harus siap. Penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Relokasi Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara harus fokus pada kesiapsiagaan Ibu Kota Baru, tegas Jokowi dalam siaran pers usai pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (PII) 2024 di JCC Senayan, Jakarta (18/09/2024). Karena ekosistem yang sudah terbangun juga nantinya akan mendorong pemindahan ibu kota secepatnya (Humas, 2024).

Dalam menyelenggarakan pemindahan serta pembangunan ibu kota di Nusantara, Pemerintah Pusat melalui UU No 3 Tahun 2022 mendirikan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut OIKN.

Lembaga setingkat kementerian ini dipimpin oleh seorang kepala otorita. Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022, OIKN memiliki status setingkat menteri dengan beberapa kewenangan khusus. OIKN memiliki peran utama dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan IKN. OIKN bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, perumahan, dan fasilitas publik, serta memastikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kota (Ahliyan, 2022). Selain itu, OIKN juga berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang modern, inklusif, dan berdaya saing. Mereka juga fokus pada pengembangan ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di IKN (Fauzi & Sujadi, 2023).

Sebagai proyek yang cukup besar, pemindahan IKN ke Nusantara menelan banyak biaya. Berangkat dari hal ini, pemerintah didorong untuk melakukan kerja sama guna pengembangan pembangunan IKN di Nusantara. Dari data yang dirilis (Setiawan, Usni, Surwandono, Meidiana, & Syakban, Analisis Kerja Sama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus, dan Kepentingan, 2024) IKN akan selesai dibangun pada tahun 2045 sejak dimulai di tahun 2022. Namun dalam proses pembangunan ini, Indonesia memerlukan dana yang cukup besar yakni Rp 466 Triliun. Angka ini didasarkan pada perhitungan perencanaan, namun sewaktu-waktu bisa saja membengkak.

Namun optimisme pengembangan pembangunan IKN tetap hidup kala proyek ini telah menerima minat yang signifikan dari para pelaku bisnis yang tertarik untuk berinvestasi di IKN untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hingga saat ini, OIKN sebagai aktor utama memainkan peran penting dan telah menerima 209 surat minat, dimana 36 diantaranya telah menandatangani perjanjian kerja sama (Setiawan, Usni, Surwandono, Meidiana, & Syakban, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Peluang dan Tantangan dari Kerja Sama Internasional*, 2023). OIKN telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penerapan peraturan khusus untuk pembiayaan IKN, insentif investasi, dan perencanaan pembangunan, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan mempercepat pertumbuhan proyek.

Dari sekian banyaknya mitra kerja sama Indonesia, Delonix Bravo menjadi salah satu investor asing yang cukup optimis mendukung pembangunan IKN Indonesia di Nusantara. Delonix Bravo adalah sebuah group investasi dan pariwisata global, yang telah menerima investasi dari perusahaan investasi terkenal dunia seperti *Sequoia Capital* dan *Ocean Link Management*. Bisnis utama Delonix Bravo berfokus pada sektor konsumen offline seperti hotel, restoran dan ruang tunggu bandara. Dalam portofolio investasinya, Delonix memiliki grup hotel mewah *New Century Hotels and Resorts*, juga perusahaan inovatif *Betterwood Lifestyle Lab* (Fajri, 2024).

Portofolio investasi grup ini mencakup lebih dari 1.600 hotel yang dikelola dan dikontrak, dan tersebar di berbagai pusat wisata dan bisnis di seluruh dunia. Dari bisnis hotelnya itu, Delonix telah memiliki lebih dari 245.000 kamar. Sebagai pengembang dan pengelola hotel, Delonix Group telah menempati peringkat ke-14 dalam daftar Top 221 Global Hotel Group dari Majalah *American HOTELS* pada 2023 lalu. Jabatan Executive Chairman Delonix Group diisi oleh Alex Zhang yang merupakan pendiri dari perusahaan-perusahaan pendahulu Delonix Group. Pada awalnya, Alex Zhang mendirikan perusahaan 7 Days Inn pada 2005 dan menjabat sebagai CEO. Pada tahun 2009, 7 Days Inn go public di New York Stock Exchange dengan 4.000 hotel dan 320.000 kamar. Empat tahun berselang, tepatnya pada 2013, Alex menggabungkan 7 Days Inn untuk mendirikan Plateno Group, yang memiliki 6.600 hotel dan 500.000 kamar. Namun, Plateno Group kemudian menjual perusahaannya kepada Jin Jiang Hotels pada 2016 senilai US\$ 1,8 miliar (Fajri, 2024).

Setelah itu, Alex menciptakan Betterwood Hotel Group pada 2017. Alex pun menduduki jabatan sebagai Chairman di Magic Life Services Group pada 2018. Barulah pada 2021 Alex mendirikan Delonix Group, dengan menggabungkan New Century Hotels dan Betterwood Hotel Group. Seiring dengan berjalannya waktu, Delonix telah memperluas kehadirannya di pasar perhotelan Indonesia, Singapura, dan Jepang. Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan pasar hotel di Asia,

dengan tujuan menciptakan pengalaman hotel yang baru dan menarik bagi konsumen (Fajri, 2024).

Pada 2023, PT Delonix Group Indonesia didirikan sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Delonix Group, dengan kantor pusat di Jakarta. PT Delonix Group Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan bisnis jaringan hotel di Indonesia. Pada tahap awal, Delonix Indonesia menghadirkan proposal berupa dua jenis hotel, yakni Model J Hotel dan Ruby Hotel, ke Indonesia. Jenis-jenis hotel ini diperuntukkan pada wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Tujuan perusahaan untuk menjadi grup hotel terbesar dan terkemuka di Indonesia dalam waktu tiga tahun (Fajri, 2024).

Kehadiran Delonix Bravo sebagai investor asing pertama yang berbasis di China, resmi membenamkan dananya sebesar Rp 500 miliar di Nusantara melalui proyek yang memadukan jenis dan fungsi beberapa properti (Ginanjari, 2024). Proyek ini terdiri dari hotel, apartemen, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan yang nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi (Ruhullessin & Alexander, 2024). Kawasan itu nantinya akan diberi nama Delonix Nusantara. Jokowi menyebut Delonix Bravo sebagai pelopor investasi asing di ibu kota baru. Ia juga berharap keberadaan Delonix Bravo di IKN dapat mendorong investor asing lainnya untuk segera berinvestasi di sana (Ginanjari, 2024).

Namun di satu sisi, peranan kerja sama ekonomi dalam pembangunan IKN ini dilihat dari adanya ambisi Delonix Bravo yang juga

ingin memperluas gurita bisnisnya. Ambisi ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik di beberapa negara. Secara ekonomi, kepentingan nasional Delonix Bravo adalah berupaya memperluas investasinya di sektor properti bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Terbentuknya kerja sama internasional antara OIKN dan Delonix Bravo menunjukkan adanya integrasi kepentingan nasional di dalamnya. Dalam konteks kerja sama antara OIKN dan Delonix Bravo dalam pembangunan IKN, memahami dinamika kerja sama sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan IKN. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Peluang dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi OIKN-Delonix Bravo dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada peluang dan tantangan dari adanya kerja sama ekonomi antara OIKN-Delonix Bravo yang kemudian akan dianalisis dalam studi kasus pembangunan Ibu Kota Nusantara. Walaupun penelitian ini hanya membahas searah tentang bagaimana pemenuhan *national interest* OIKN dengan memanfaatkan investasi dari Delonix Bravo, penulis tetap menyajikan kepentingan Delonix Bravo. Dengan demikian, penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang kerja sama ekonomi OIKN-Delonix Bravo dalam pembangunan ibu kota nusantara?
2. Bagaimana tantangan kerja sama ekonomi OIKN-Delonix Bravo dalam pembangunan ibu kota nusantara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peluang kerja sama ekonomi OIKN-Delonix Bravo dalam pembangunan ibu kota nusantara
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan kerja sama ekonomi antara OIKN-Delonix Bravo dalam pembangunan ibu kota nusantara

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan akan diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana peluang dan tantangan kerja sama ekonomi antara OIKN-Delonix Bravo dalam pembangunan ibu kota nusantara.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi para mahasiswa khususnya pada studi Ilmu Hubungan Internasional dan studi serupa baik itu untuk penelitian

dalam pengerjaan tugas kuliah maupun dalam melanjutkan studinya.

## **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini menggunakan dua konsep untuk membedah variabel di dalamnya. Konsep – konsep yang akan digunakan yakni, kerja sama internasional dan *National Interest*. Konsep kerja sama internasional akan digunakan untuk menggambarkan hubungan kerja sama yang dibangun antara OIKN dengan Delonix Bravo dalam membangun IKN. Kemudian konsep *National Interest* akan digunakan untuk memahami tujuan dan kebutuhan dari tiap aktor dalam membangun kerja sama terutama pada studi kasus ini.

### **1. Kerja Sama Internasional**

Interaksi lintas batas saat ini mendorong berbagai aktor dalam hubungan internasional untuk melakukan kerja sama. Hubungan yang dibangun berupa kerja sama umumnya dilakukan oleh negara, *non governmental organization*, individu, maupun perusahaan. Kerja sama ini yang disebut juga dengan kerja sama internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan atau masing – masing aktor.

Menurut K.J. Holsti, kerja sama internasional muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang timbul di tingkat nasional, regional, maupun global, yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Ia menjelaskan bahwa dalam proses tersebut,

masing-masing negara mengajukan pendekatan melalui usulan atau solusi untuk mengatasi permasalahan, melakukan negosiasi atau tawar-menawar, serta merumuskan bukti-bukti yang mendukung salah satu usulan yang diajukan. Holsti menekankan bahwa proses ini idealnya diakhiri dengan suatu kesepakatan yang mampu memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.

Mengingat adanya hubungan yang saling ketergantungan dan meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat internasional, kerja sama dianggap sangat penting. Ekonomi, keamanan, ekologi, dan tantangan lainnya semuanya dapat diatasi melalui kerja sama. Kerja sama internasional adalah salah satu konsep utama dalam hubungan internasional, yang banyak dibahas dalam teori neoliberalisme oleh para ilmuwan seperti Robert Keohane dan Joseph Nye. Keduanya berperan penting dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana negara-negara dapat bekerja sama meskipun tidak ada otoritas global yang mengatur sistem internasional.

Kerja sama internasional, menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, merupakan konsep yang berfokus pada pentingnya interdependensi dan peran institusi internasional dalam mengelola hubungan antarnegara. Mereka percaya bahwa meskipun tidak ada otoritas global yang dapat memaksa negara untuk bekerja sama, institusi internasional dapat memainkan peran kunci dalam

menciptakan kerja sama yang stabil dan berkelanjutan. Kerja sama internasional ini sangat penting terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Sehingga dalam penelitian ini, kerja sama internasional akan digunakan untuk menggambarkan kerja sama OIKN-Delonix Bravo yang dibangun dalam rangka pembangunan ibu kota Nusantara.

## **2. *National Interest***

Konsep yang paling banyak digunakan ketika menangani hubungan internasional antar aktor adalah kepentingan nasional. Gagasan ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu aktor berperilaku saat berinteraksi dengan yang lain. Charles Bread menegaskan bahwa tujuan dan aspirasi aktor dalam melakukan urusan luar negeri dimotivasi oleh kepentingan nasional. (Bakry, 2017). Mengejar kekuasaan, atau segala sesuatu yang dapat membangun dan mempertahankan dominasi suatu aktor atas aktor lain, adalah kepentingan nasional setiap aktor menurut Hans J. Morgenthau. Selain itu, Morgenthau membedakan antara dua tingkat kepentingan nasional: kepentingan nasional esensial (atau vital) dan kepentingan nasional sekunder. Kepentingan nasional utama ini berkaitan dengan keamanan dan keberadaan suatu bangsa serta pelestarian identitas fisik, politik, dan budayanya. Bahkan sebuah bangsa tidak berpikir dua kali untuk berperang untuk mencapai kepentingan pentingnya. Sebaliknya,

kepentingan sekunder adalah kepentingan yang masih bisa dinegosiasikan dengan negara lain. (Morgenthau, 2010).

Menurut Scott Burchill, insentif suatu negara untuk menerapkan kebijakan luar negerinya adalah kepentingan nasionalnya. Scott Burchill mengkaji gagasan kepentingan nasional dari lima sudut pandang berbeda dalam bukunya, *The National Interest in International Relations Theory: realisme, liberalisme, constructivism, Marxisme, and English School*. Realisme sebagai suatu cara pandang melihat kepentingan nasional adalah kepentingan negara sebagai aktor tertinggi dalam global. Liberalisme secara inheren mengakui bahwa kepentingan nasional terkait dengan pasar dan negara.

Namun, sudut pandang liberal dan realis dikritik oleh Marxisme. Kaum Marxisme justru mendefinisikan kepentingan nasional melalui perspektif kelas dan hubungan ekonomi. Menurut kaum marxis, kepentingan nasional tidak dilihat sebagai sesuatu yang netral atau objektif, melainkan sebagai konstruksi ideologis yang merefleksikan dinamika kelas dan struktur ekonomi kapitalis, baik di dalam negeri maupun dalam arena global (Burchill, 2005).

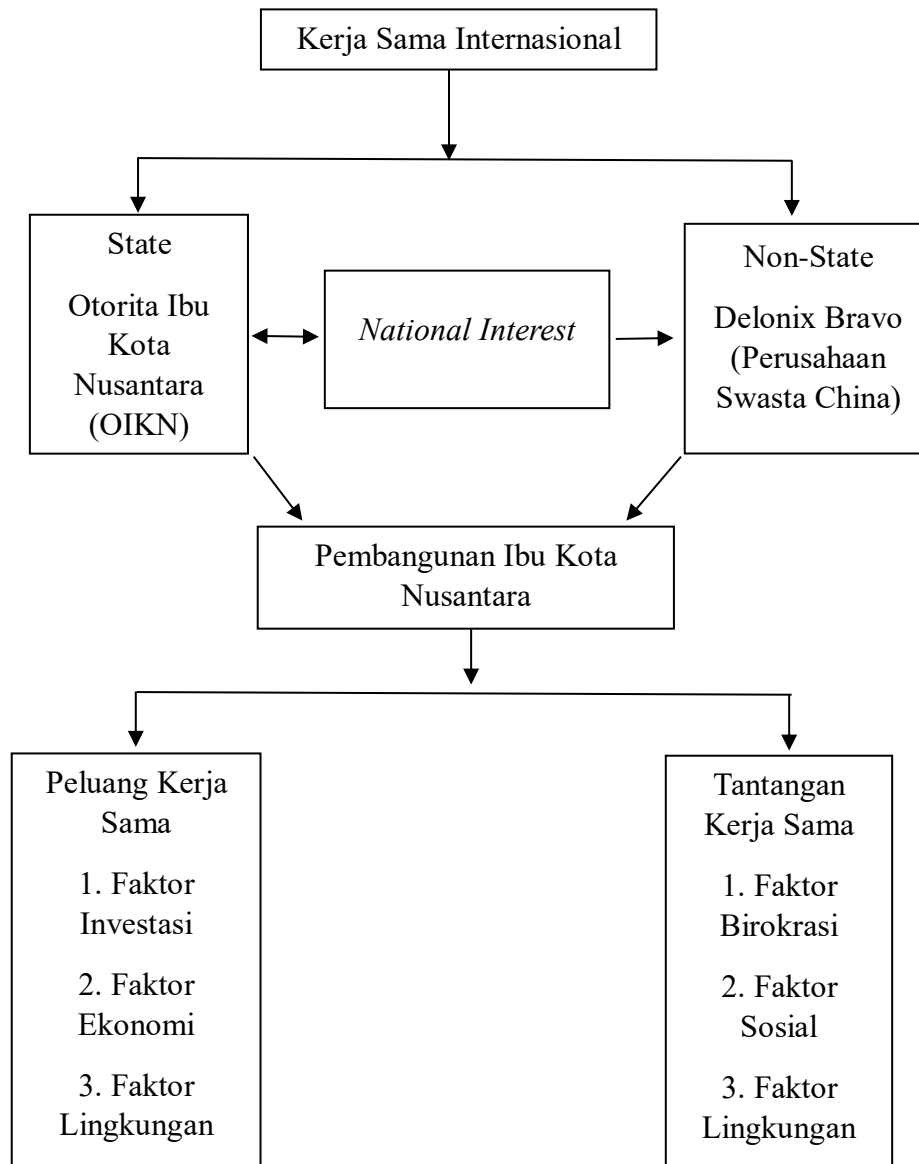
Selain itu, konstruktivisme dalam sudut pandang lain yang memandang kepentingan nasional sebagai konstruksi yang diproduksi secara sosial yang sejalan dengan keadaan masyarakat global. Oleh karena itu, hubungan antara lembaga politik

internasional, pemerintah, dan struktur secara sosial membentuk kepentingan nasional. Serupa dengan *English School*, ia melihat bahwa negara mendefinisikan kepentingan nasional berdasarkan saling pengakuan atas keberadaan negara lain dan kepedulian tentang bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi entitas lain tersebut, bukan pada kemerdekaan dan isolasinya (Burchill, 2005).

Sudut pandang yang berbeda tentang kepentingan nasional dalam hubungan internasional ditawarkan oleh beberapa definisi dan sudut pandang yang berkaitan dengan kepentingan nasional yang disebutkan di atas. Gagasan kepentingan nasional ini pada dasarnya digunakan oleh para peneliti untuk mengkarakterisasi dan memeriksa pendorong utama, insentif, atau penjelasan yang mendasari tindakan atau perilaku suatu negara dalam berurusan dengan negara lain. Dalam penelitian ini, konsep *National Interest* akan digunakan untuk mendeskripsikan dorongan kerja sama antar kedua aktor yang dibangun oleh OIKN-Delonix Bravo.

### 3. Skema Penelitian

*Bagan 1 Kerangka Konseptual*



Sumber: Diolah oleh Penulis

Pada penelitian ini, kerja sama internasional dan *national interest* menjadi dua pisau bedah dalam menganalisis studi kasus yang diangkat. Dua konsep ini membantu penulis dalam proses menganalisis dua aktor pada pembangunan ibu kota nusantara.

Kemudian dari hasil analisis itu, penulis menghasilkan peluang dan tantangan dari kerja sama ekonomi OIKN-Delonix Bravo dalam pembangunan ibu kota nusantara sebagai hasil dari penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian kali ini, permasalahan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metode ini menurut Strauss dan Corbin dalam Nugrahani (Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 2014) berguna untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, gerakan sosial, ataupun hubungan kekerabatan. Sehingga, metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa bagaimana peluang dan tantangan dari adanya kerja sama ekonomi antara OIKN-Delonix Bravo dalam pembangunan ibu kota nusantara. Hasil dari analisa berupa tulisan deskriptif dan gambar-gambar yang membantu memperjelas hasil analisa topik dalam penelitian ini.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya dalam hal ini yang dimaksudkan adalah peneliti mengkaji data yang diperoleh dari

media seperti buku, jurnal, dokumen resmi, *website*, hingga media elektronik lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik ini melibatkan aktivitas membaca dan mencatat kemudian mengelolanya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari data melalui buku, jurnal, dokumen resmi, *website*, hingga media elektronik lainnya yang memiliki integritas dan akuntabilitas.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data sekunder yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan deskriptif sebagai hasil dari penelitian.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerja Sama Internasional**

Negara tidak dapat bertahan hidup sendiri di dunia ini, seperti yang dilakukan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan kepentingan nasionalnya, negara membutuhkan bantuan dari negara lain atau aktor lain. Negara-negara tidak diragukan lagi akan terlibat dengan aktor lain di bidang hubungan internasional untuk membangun koneksi karena akan ada situasi di mana kebutuhan satu negara bergantung pada yang lain.

Munculnya berbagai bentuk kerja sama internasional regional berdasarkan isu-isu politik, ekonomi, dan lainnya kemudian menunjukkan bagaimana kondisi tersebut telah berkembang dalam hubungan internasional. Untuk mendapatkan visualisasi yang empiris mengenai kerja sama internasional, berbagai akademisi mendefinisikan kerja sama internasional dari beragam karyanya. Menurut K. J. Holsti misalnya, kerja sama internasional dapat didefinisikan dari poin – poin berikut:

1. Mempunyai perspektif akan adanya dua hal atau lebih dalam hal ini seperti (kepentingan, nilai, maupun tujuan) yang kemudian saling bertemu dan dapat menghasilkan suatu hal yang dapat dipenuhi dan dipublikasikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

2. Memiliki harapan untuk masa depan bahwa kebijakan yang dibuat oleh para aktor lain akan membantu negara mencapai tujuan dan cita – cita lainnya
3. Penggunaan minat yang sama atau berbagi adalah inti dari perjanjian dan sengketa antara dua atau lebih aktor.
4. Untuk mencapai persetujuan, perjanjian di masa depan akan diatur oleh hukum formal maupun informal.
5. Keberadaan klausul dalam kontrak yang memenuhi persetujuan para pihak.

Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai bentuk harapan, pandangan, dan langkah suatu negara dalam merespons kepentingan, nilai, atau tujuan yang sejalan dengan aktor lain. Kemudian dari itu menghasilkan suatu *output* yang dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional maupun tujuan lainnya bagi negara tersebut. Definisi ini berdasar pada kesimpulan yang ditarik dari poin-poin Holsti di atas. (Holsti, Azhary, & Sinaga, 1988).

David Mitrany, dalam bukunya *The Functional Theory of Politics* (1976) menyatakan bahwa tren kerja sama internasional antar negara telah membawa manfaat di berbagai sektor. Seperti kerja sama teknologi akan menghasilkan *spillover effect*, yaitu menyebarnya kemajuan teknologi di berbagai sektor seperti energi, perdagangan, dan sumber daya alam. Pada situasi ini terjadi saling ketergantungan, dan negara-negara berlomba-lomba memperluas kerja sama ke sektor lain (Mitrany, 1976).

David Mitrany berargumen bahwa untuk menghindari konflik dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, dunia perlu membangun bentuk kerja sama internasional yang tidak berlandaskan hanya pada struktur politik tradisional seperti aliansi militer atau federasi negara, melainkan juga pada kebutuhan-kebutuhan fungsional yang nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari. David Mitrany menolak pandangan bahwa perdamaian dapat dicapai hanya melalui integrasi politik atau pembentukan negara supranasional seperti yang diidealkan oleh para federalis. Sebaliknya, ia percaya bahwa kerja sama internasional yang efektif harus dibangun di atas dasar penyelesaian masalah-masalah praktis dan teknis yang dihadapi bersama oleh berbagai negara (Mitrany, 1976).

Ia memberi contoh seperti kesehatan, transportasi, perdagangan, dan lingkungan sebagai sektor-sektor di mana negara-negara dapat bekerja sama secara langsung tanpa perlu menyerahkan kedaulatan politik mereka. Dalam pandangannya, institusi-institusi internasional yang dibentuk untuk menangani isu-isu spesifik tersebut akan secara bertahap memperkuat rasa saling ketergantungan antar negara, sehingga mendorong terciptanya perdamaian dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Bagi David Mitrany, penting untuk memisahkan antara masalah teknis dan politik. Ia menilai bahwa sebagian besar permasalahan global bersifat teknis dan membutuhkan solusi rasional yang (Mitrany, 1976).

Oleh karena itu, ia menganjurkan pembentukan institusi-institusi internasional yang dijalankan oleh para ahli atau teknokrat, bukan politisi.

Dengan cara ini, kerja sama internasional akan lebih stabil dan tidak terikat oleh dinamika politik domestik masing-masing negara. Pandangan David Mitrany ini mencerminkan optimisme bahwa kemajuan dalam hubungan antarbangsa bisa dicapai melalui logika kerja sama yang rasional dan praktis (Mitrany, 1976).

Meskipun pandangan tersebut sempat diperdebatkan oleh para pendukung integrasi politik dan teori realis, sumbangan pemikirannya tetap relevan dalam pemahaman kita terhadap cara kerja organisasi internasional masa kini, seperti WHO (*World Health Organization*), WTO (*World Trade Organization*), atau institusi-institusi PBB lainnya. Melalui pendekatan fungsionalisme, Mitrany telah meletakkan dasar intelektual bagi berkembangnya bentuk-bentuk kerja sama internasional yang berorientasi pada penyelesaian masalah konkret umat manusia, di luar batas-batas negara dan ideologi (Mitrany, 1976).

Kontribusi perdebatan neo-neo dalam melihat kerja sama internasional juga begitu penting bagi hubungan internasional. Neorealisme, yang dipopulerkan oleh Kenneth Waltz, melihat sistem internasional sebagai anarki, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai aktor utama yang rasional dan berusaha untuk bertahan hidup. Karena itu, kerja sama internasional dianggap sangat sulit terjadi, atau setidaknya sangat terbatas (Dugis, 2016).

Negara-negara cenderung curiga satu sama lain, khawatir kalau kerja sama justru akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan relatif yang lebih besar. Masalah seperti ketergantungan dan keamanan menjadi kekhawatiran utama. Jadi, dari sudut pandang neorealisme, walaupun kerja sama bisa saja terjadi, ia sangat rapuh dan seringkali dibatasi oleh kepentingan keamanan masing-masing negara (Dugis, 2016).

Sementara itu, neoliberalisme, seperti yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, juga mengakui bahwa sistem internasional bersifat anarkis. Namun, mereka lebih optimis terhadap kemungkinan kerja sama. Mereka berargumen bahwa negara-negara tidak hanya peduli pada kekuatan militer atau bertahan hidup, tapi juga pada hasil-hasil absolut yang bisa mereka peroleh melalui kerja sama. Selaras dengan apa yang diutarakan Mitrany, neoliberalisme percaya bahwa institusi internasional seperti PBB, WTO (*World Trade Organization*), atau rezim-rezim kerja sama lain bisa membantu mengurangi ketidakpastian antarnegara, mengatur perilaku, dan menciptakan transparansi. Dengan adanya aturan, norma, dan mekanisme pengawasan, negara-negara akan lebih mungkin untuk menjaga kerja sama jangka panjang (Mitrany, 1976).

Perdebatan utama antara keduanya muncul karena neorealisme melihat negara sebagai entitas yang sangat fokus pada kekuasaan dan keamanan, sehingga kerja sama hanya akan terjadi jika sejalan dengan tujuan mempertahankan kekuatan. Sedangkan neoliberalisme menilai

bahwa negara bisa memiliki kepentingan yang lebih kompleks dan bahwa kerja sama justru bisa menjadi sarana untuk mencapai stabilitas dan keuntungan bersama, terutama jika didukung oleh institusi yang kuat dan kepercayaan antarnegara. Jadi, pada dasarnya, perbedaan mereka terletak pada tingkat kepercayaan terhadap potensi kerja sama internasional dalam kondisi anarki dan bagaimana masing-masing teori memandang peran institusi serta kepentingan negara dalam hubungan internasional (Dugis, 2016).

Sejak awal 1980-an, sebagian besar hubungan internasional didominasi oleh perdebatan tentang konsep kerja sama internasional (Oye, 1986). Yang mendorong inovasi teoretis ini adalah perkembangan dalam ekonomi kelembagaan baru dan teori permainan, yang menggunakan gagasan tentang perjanjian yang dapat ditegakkan sendiri, perilaku oportunistik, dan kurangnya kewajiban hukum yang menjadi ciri khas arena internasional (Kaul, Grunberg, & Stern, 1999).

Konsep kerja sama internasional mengalami kemajuan pesat dengan menerima asumsi bahwa negara-negara memiliki kepentingan pribadi dan memiliki konflik kepentingan satu sama lain. Para ahli teori menerima tantangan untuk menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat muncul dan bahkan menunjukkan stabilitas di tengah keyakinan akan anarki dalam hubungan internasional (Kaul, Grunberg, & Stern, 1999). Penekanan pada anarki merupakan bagian yang sangat penting dalam mendefinisikan kerja sama internasional. Hal ini

dikarenakan mengesampingkan kemungkinan bahwa kerja sama akan ditegakkan oleh agen luar. Seperti yang dijelaskan Oye, "negara-negara hidup dalam anarki yang terus-menerus, karena tidak ada otoritas pusat yang membatasi pengejaran kepentingan kedaulatan" (Oye, 1986).

## **B. *National Interest***

Setiap negara dunia dalam menjalankan kenegaraannya tidak akan lepas dari tujuan dan kepentingan nasionalnya, hal inilah yang disebut sebagai *national interest*. *National interest* erat kaitannya dengan paradigma realisme, dimana keamanan menjadi tujuan utama sebuah negara (Humphreys, 2014). Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kehadiran gelombang globalisasi menyebabkan negara tidak lagi sekadar berjuang mencapai keamanan negaranya, hal ini dalam konteks keamanan tradisional seperti peperangan. Di zaman modern seperti saat ini, sudah jarang terjadi perang antar negara seperti dulu. Permasalahan yang terjadi di seluruh lapisan dunia menjadi lebih kompleks. Salah satunya adalah bagaimana negara berkembang berusaha untuk membangun negaranya.

Para akademisi hubungan internasional telah lama memperdebatkan kelebihan dan kekurangan gagasan kepentingan nasional. Menurut Paul Seabury, misalnya, kepentingan nasional sering dikaitkan dengan daftar tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui kebijakan luar negerinya. Akibatnya, konsep kepentingan nasional bersifat deskriptif, menunjukkan bahwa itu adalah tujuan yang harus dicapai suatu bangsa melalui peran pemerintahnya. Konsep

semacam itu menunjukkan upaya untuk menerjemahkan abstraksi menjadi aktualitas (fakta) sehingga kepentingan nasional dapat dirumuskan sesuai dengan kebijakan luar negeri suatu bangsa. (Wijayanti, 2022).

Pada kenyataannya, ada banyak cara pandang mengenai “kepentingan nasional”. Burchill dalam bukunya yang berjudul *The National Interest in International Relations Theory*, menganalisis konsep kepentingan nasional dalam beberapa perspektif. Dalam perspektif realisme misalnya, Burchill menjelaskan bahwa hubungan internasional bersifat “apa adanya”, *self-governed*, dan selalu memiliki kecurigaan terhadap negara lain (Burchill, 2005). Karena "negara" telah menjadi otoritas politik tertinggi dalam masyarakat sejak tahun 1648 dan karena anarkisme dalam politik internasional hanya dapat dikalahkan oleh negara, sudut pandang ini berpendapat bahwa kepentingan nasional harus dilihat dari perspektif negara. Oleh sebab itu, kepentingan nasional adalah kepentingan negara yang berasal dari otoritas mereka. (Morgenthau H. J., 1952).

Pandangan di atas, direpresentasikan oleh Hans J. Morgenthau. Dia menegaskan bahwa kekuasaan minimum negara untuk melindungi karakter politik, budaya, dan fisiknya dari campur tangan luar adalah kepentingan nasional. Karena tinjauan ini, pengambil keputusan biasanya akan menciptakan kepentingan nasional yang selaras dengan kebutuhan negara mereka, yang dapat menyebabkan kepentingan nasional menyimpang atau bahkan berkonflik. Menurut Morgenthau, kekuasaan

yaitu apa pun yang dapat membangun dan menjunjung tinggi dominasi satu bangsa atas negara lain adalah kepentingan nasional masing-masing bangsa. (Morgenthau H. J., 1952).

Kepentingan nasional telah menjadi fokus utama dalam studi hubungan internasional sejak lama, menjadi landasan bagi berbagai teori dan pendekatan dalam analisis politik global. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pemahaman konsep kepentingan nasional adalah Hans Morgenthau. Ia menekankan bahwa kepentingan nasional merupakan alasan utama di balik tindakan negara-negara dalam kancah hubungan internasional. Menurutnya, seluruh keputusan politik suatu negara, baik yang berkaitan dengan diplomasi, ekonomi, maupun keamanan berpusat pada kepentingan nasional tersebut. (Morgenthau H. J., 2010).

Selain Morgenthau, kontribusi lain dalam pemahaman tentang kepentingan nasional datang dari Kenneth Waltz, seorang teoritikus neorealisme. Dalam karyanya yang berpengaruh, "*Theory of International Politics*" (1979), Waltz menyoroti bahwa anarki sistemik, yaitu kurangnya otoritas pusat dalam sistem internasional, memaksa negara-negara untuk memprioritaskan kepentingan nasional demi kelangsungan hidup mereka. Menurut Waltz, dalam kondisi anarki ini, negara-negara cenderung berperilaku rasional dengan memperhitungkan kepentingan nasional mereka dalam interaksi dengan negara lain (Waltz, 1979).

Pemikiran Morgenthau dan Waltz ini membentuk dasar bagi pemahaman tentang peran kepentingan nasional dalam hubungan

internasional. Kontribusi mereka memperkaya kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis perilaku negara-negara dan dinamika hubungan internasional. Dengan memahami konsep ini secara lebih mendalam, kita dapat lebih baik dalam meramalkan dan menjelaskan tindakan-tindakan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dan regional.

Dalam hubungan internasional, istilah "kepentingan nasional" sering digunakan untuk merujuk pada hasil yang diinginkan suatu negara di bidang budaya, ekonomi, dan kekuatan militer. Negara menggunakan tujuan ini sebagai panduan saat bekerja dengan aktor hubungan internasional lainnya (Wijayanti, 2022). Mengacu pada (Wijayanti, 2022), *national interest* atau kepentingan nasional dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu:

- a) Sebagai alat analisis untuk melihat alternatif kebijakan luar negeri suatu negara
- b) Sebagai kriteria untuk mengevaluasi kebijakan atau tindakan tertentu
- c) Sebagai justifikasi terhadap kebijakan luar negeri

Menurut gagasan realisme, salah satu aspek terpenting dari hubungan internasional adalah kepentingan nasional. Menurut realisme, tujuan utama negara harus bertahan hidup, dan tujuan lain, termasuk pembangunan ekonomi, harus digunakan sebagai sarana untuk

mempertahankan kelangsungan hidup itu (Wijayanti, 2022). Berdasar pada (Wijayanti, 2022), hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu:

- a) Konsep kepentingan nasional bersifat sewenang-wenang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan pada saat pengambilan keputusan.
- b) Kepentingan nasional pada hakikatnya tidak mencerminkan kepentingan bersama (*common interest*)
- c) Kepentingan nasional disusun secara sepihak sehingga memungkinkan terjadinya konflik
- d) Kepentingan nasional sering dilaksanakan dengan standar ganda
- e) Kepentingan nasional sering ditujukan hanya pada jangka pendek.
- f) Suatu negara dalam menjalin kerja samanya tidak lain adalah sebagai dorongan untuk dicapainya *national interest* dari negara tersebut. Sehingga, dalam pemilihan mitra kerja samanya dilalui banyak pertimbangan, seperti memilih mitra yang dianggap mampu menopang kerja sama tersebut. Konsep kepentingan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kerja sama internasional suatu negara dan dalam memandu tindakan mereka di arena internasional. Kepentingan nasional tidak hanya mencakup aspek keamanan dan ekonomi, tetapi juga dapat melibatkan isu-isu lingkungan dan kemanusiaan yang semakin mendesak. Kepentingan nasional suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi politik, identitas nasional, dan norma internasional.

Secara teoritis, kerja sama internasional berupaya menjaga stabilitas ekonomi global, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan keamanan timbal balik. Setiap bangsa akan memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan kerja sama ini. Kebijakan luar negeri setiap negara ditentukan oleh definisi kepentingan nasionalnya sendiri, yang juga berfungsi sebagai tujuan dan aspirasi negara. Ketika memutuskan kebijakan domestik dan luar negeri yang berbeda, kepentingan nasional Indonesia memainkan peran penting.

Pada dasarnya kepentingan nasional Indonesia telah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yakni, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kepentingan nasional suatu negara yang utama meliputi *sovereignty*, *security*, dan *survival*. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa kepentingan nasional Indonesia mengarah pada jenis kepentingan *survival* yang mana Indonesia berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat di negaranya (Solechah & Sugito, 2023).

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang hendak dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu guna

melihat persamaan, perbedaan, dan berguna sebagai acuan dalam mencari ide baru pada penelitian yang hendak dilakukan. Maka, penelitian ini mengambil lima penelitian terdahulu dan akan dijabarkan sebagai berikut:

Penelitian terdahulu pertama yaitu Analisis Kerja sama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus, dan Kepentingan. Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Asep Setiawan, Usni, Surwandono, Dina Meidiana, dan Mansyur Syakban pada tahun 2024. Di dalam penelitian ini membahas tiga analisis kerja sama internasional dalam membangun IKN. Pertama, bentuk kerja sama yang dijalin dalam membangun IKN adalah kerja sama bilateral dan juga kerja sama multilateral. Kedua, fokus kerja sama dalam membangun IKN yakni merujuk pada pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan infrastruktur. Ketiga, kepentingan kerja sama dalam membangun IKN muncul dari beragam mitra kerja sama yakni kepentingan politik dan ekonomi (Setiawan, Usni, Surwandono, Meidiana, & Syakban, Analisis Kerja Sama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus, dan Kepentingan, 2024).

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah kesamaan membahas kerja sama internasional dalam membangun IKN. Namun perbedaannya adalah, tulisan ini membahas tiga analisis kerja sama internasional yakni bentuk, fokus, dan kepentingan. Sedangkan fokus analisis kerja sama internasional yang dibahas pada tulisan yang

diajukan oleh penulis adalah pada peluang dan tantangan kerja sama antara OIKN-Delonix Bravo dalam membangun IKN.

Penelitian terdahulu kedua yaitu Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik dan Asing. Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Aulia Safira Putri, Mei Indrawati, dan Rusdiyanto pada tahun 2024. Di dalam penelitian ini membahas potensi investasi di IKN dan Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, penelitian ini juga membahas tentang pertumbuhan investasi di Kalimantan Timur dan IKN. Dua bahasan utama ini menjelaskan bahwa potensi investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor dan adanya pertumbuhan investasi tiap triwulan sejak 2021-2024 (Putri, Indrawati, & Rusdiyanto, Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik dan Asing, 2024).

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah kesamaan membahas investasi sebagai bentuk kerja sama internasional dengan asing. Namun perbedaannya adalah, tulisan ini lebih fokus membahas dampak pembangunan IKN terhadap potensi pertumbuhan investasi. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah berfokus pada peluang dan tantangan yang dihadapi OIKN-Delonix Bravo dalam membangun IKN.

Penelitian terdahulu ketiga yaitu Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Peluang dan Tantangan dari Kerja Sama Internasional. Penelitian terdahulu

ini ditulis oleh Asep Setiawan, Usni, Surwandono, Dina Meidiana, dan Mansyur Syakban pada tahun 2023. Penelitian ini membahas terkait peluang Indonesia pada kerja sama internasional dalam pemindahan ibu kota Indonesia yakni adanya pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, inklusi sosial, dan diplomasi politik. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan Indonesia pada kerja sama internasional dalam pemindahan ibu kota Indonesia yakni terkait menyeimbangkan kepentingan nasional, mempertahankan identitas budaya, menyelesaikan masalah lingkungan, dan menjamin partisipasi yang adil (Setiawan, Usni, Surwandono, Meidiana, & Syakban, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Peluang dan Tantangan dari Kerja Sama Internasional*, 2023).

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah kesamaan menjadikan peluang dan tantangan kerja sama internasional dalam pemindahan IKN sebagai fokus pembahasan. Namun perbedaan tulisan ini terletak pada aktornya yang cukup kompleks. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis berfokus pada satu aktor yakni Delonix Bravo.

Penelitian terdahulu keempat yaitu *Masa Depan Ibu Kota Nusantara: Pembelajaran Dari Pendirian Ibu Kota Brasilia*. Penelitian ini ditulis oleh Gufron Gozali, dan Zulmi Zuliansyah pada tahun 2024. Penelitian ini membahas dampak pemindahan ibu kota Brasilia, skema pendanaan pembangunan ibu kota Brasilia, kemampuan Brasilia mengatasi disparitas ekonomi dan sosial di Brazil, serta beberapa pembelajaran untuk

Indonesia dalam menarik investor dan juga merancang skema pembiayaan IKN (Gozali & Zuliansyah, 2024).

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah terdapat kesamaan motif dalam upaya memindahkan ibu kota negara yaitu untuk pemerataan penduduk serta pemerataan ekonomi. Namun perbedaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah adanya penjelasan mengenai kemampuan Brasilia sebagai ibu kota baru dalam mengatasi disparitas ekonomi dan sosial di Brazil. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis hanya membahas dan berfokus pada peluang dan tantangan kerja sama antara OIKN-Delonix Bravo.

Penelitian terdahulu kelima yaitu *Opportunities of International Cooperation in Relocating the New Capital of Indonesia*. Penelitian ini ditulis oleh Dadang Ilham Kurniawan Mujiono, dan Uni W. Sagena pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang potensi kerja sama internasional yang akan terbangun dalam pemindahan ibu kota negara. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini juga membahas kemungkinan kerja sama yang akan terjadi seperti bantuan keuangan, investasi, infrastruktur, dan tenaga kerja (Mujiono & Sagena, 2020)

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan penulis adalah kesamaan membahas kerja sama internasional sebagai kebijakan luar negeri pemerintah dalam mendukung pemindahan ibu kota negara. Namun perbedaannya adalah, tulisan ini tidak memfokuskan bentuk dan aktor kerja sama internasional yang kemungkinan akan terbentuk dengan

pemerintah Indonesia. Sedangkan tulisan yang diajukan penulis sudah membahas aktor kerja sama internasional dengan bentuk kerja sama seperti apa yang dijalin dalam mendukung pembangunan ibu kota negara.

### **Tabel Penelitian Terdahulu**

Judul yang diajukan oleh penulis: Dinamika Kerja sama Ekonomi OIKN-Delonix Bravo dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

1. Judul Penelitian : Analisis Kerja Sama Internasional dalam Membangun IKN: Bentuk, Fokus, dan Kepentingan

Penulis : Asep Setiawan, Usni, Surwandono, Dina Meidiana, dan Mansyur Syakban

Tahun : 2024

Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Persamaan penelitian ini adalah membahas kerja sama internasional dalam membangun IKN	Perbedaan penelitian ini adalah tulisan ini membahas tiga analisis kerja sama internasional yakni bentuk, fokus, dan kepentingan. Sedangkan fokus analisis kerja sama internasional yang dibahas pada tulisan yang diajukan oleh penulis adalah pada peluang dan tantangan kerja sama antara OIKN-Delonix Bravo dalam membangun IKN

2. Judul Penelitian : Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik dan Asing

Penulis : Aulia Safira Putri, Mei Indrawati, dan Rusdiyanto

Tahun : 2024

Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Persamaan penelitian ini adalah kesamaan membahas investasi sebagai bentuk kerja sama internasional dengan asing	Perbedaan penelitian ini adalah tulisan ini lebih fokus membahas dampak pembangunan IKN terhadap potensi pertumbuhan investasi. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis berfokus pada peluang dan tantangan yang dihadapi OIKN-Delonix Bravo dalam membangun IKN

3. Judul Penelitian : Pemindahan Ibu Kota Indonesia: Peluang dan Tantangan dari Kerja Sama Internasional

Penulis : Asep Setiawan, Usni, Surwandono, Dina Meidiana, dan Mansyur Syakban

Tahun : 2023

Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Persamaan penelitian ini adalah kesamaan menjadikan peluang dan tantangan kerja sama internasional dalam pemindahan IKN sebagai fokus pembahasan	Perbedaan penelitian ini adalah tulisan ini memiliki aktor yang cukup kompleks. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis berfokus pada satu aktor yakni Delonix Bravo

4. Judul Penelitian : Masa Depan Ibu Kota Nusantara:  
Pembelajaran Dari Pendirian Ibu Kota Brasilia

Penulis : Gufron Gozali, dan Zulmi Zuliansyah

Tahun : 2024

Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Persamaan penelitian ini adalah kesamaan motif dalam upaya memindahkan ibu kota negara yaitu untuk pemerataan penduduk serta pemerataan ekonomi	Perbedaan penelitian ini adalah tulisan ini menjelaskan kemampuan Brasilia sebagai ibu kota baru dalam mengatasi disparitas ekonomi dan sosial. Sedangkan tulisan yang diajukan oleh penulis hanya membahas dan berfokus pada peluang dan tantangan kerja sama antara OIKN-Delonix Bravo

5. Judul Penelitian : Opportunities of International Cooperation  
in Relocating the New Capital of Indonesia

Penulis : Dadang Ilham Kurniawan Mujiono, dan  
Uni W. Sagena

Tahun : 2020

Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Persamaan penelitian ini adalah kesamaan membahas kerja sama internasional sebagai kebijakan luar negeri pemerintah dalam mendukung pemindahan ibu kota negara	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak memfokuskan bentuk dan aktor kerja sama internasional yang kemungkinan akan terbentuk dengan pemerintah Indonesia. Sedangkan tulisan yang diajukan penulis sudah

	membahas aktor kerja sama internasional dengan bentuk kerja sama seperti apa yang dijalin dalam mendukung pembangunan ibu kota negara.
--	--